



Hamengku Buwono X  
Gubernur DIY

## INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016



Paku Alam X  
Wakil Gubernur DIY

*Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati dan cintai. Warga masyarakat yang memang Istimewa, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran *Allah Subhanahu Wata'ala* atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

Penyusunan dan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY. Visi Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017, yaitu: **"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi yang merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi, yakni : (1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; (2) Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; (3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Pencapaian misi pertama, yaitu **"Membangun Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan"**, diimplementasikan melalui urusan pendidikan, perpustakaan,

kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, tenaga kerja dan kebudayaan.

## 1) Urusan Pendidikan.

Pembangunan pendidikan untuk mewujudkan kemajuan peradaban dilaksanakan dengan berkesinambungan melalui peningkatan kualitas pendidikan untuk semua, berdaya saing, dan non diskriminatif; pendidikan karakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan; dan penyelenggaraan layanan pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pembangunan pendidikan diarahkan dan dipandu visi *Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2025*. Capaian kualitas pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 dapat digambarkan pada tabel berikut

**Tabel 1. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2015-2016**

No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)		Angka Putus Sekolah (%)		Angka Kelulusan (%)		Kualifikasi Pendidikan Guru/ S1 (%)		Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	SD/ MI	1,58	1,31	0,03	0,03	96,14	97,29	85,80	87,74	80,24	81,56
2	SMP/ MTs	0,16	0,16	0,19	0,19	97,27	98,71	89,60	90,73	91,17	91,95
3	SMA/ MA/ SMK	0,15	0,13	0,27	0,16	97,66	97,85	94,45	95,72	94,67	94,79

Sumber : Disdikpora DIY, 2017

Indikator kualitas pendidikan dilihat dari angka mengulang, angka putus sekolah, angka kelulusan, ketersediaan guru sesuai kualifikasi dan ketersediaan ruang kelas dalam kondisi baik. Kecenderungan penurunan angka mengulang dan angka putus sekolah mengindikasikan bahwa semakin baiknya penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menempuh pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran juga tampak dari meningkatnya angka kelulusan pada semua satuan pendidikan. Hal ini didukung oleh semakin tercukupinya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan guru / S1 dan keberhasilan peningkatan kondisi ruang kelas dalam kondisi yang baik.

Kinerja urusan pendidikan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017, urusan pendidikan tahun 2016 meliputi 5 indikator, dengan target pencapaian sebagai berikut:

Capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 sebesar 9,10 tahun, meningkat 0,11 poin daripada capaian pada tahun 2015. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu 11,6 tahun. Namun secara

nasional, capaian rerata lama sekolah DIY berada jauh di atas rata – rata lama sekolah nasional yang mencapai 7,84 tahun.

Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 9.000 masyarakat yang telah mendapatkan layanan pendidikan non formal dan informal. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan serta meningkat dari capaian tahun 2015 sebesar 8.000 orang.

Upaya menyelaraskan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan perkembangan pasar, dengan mendasarkan pada pendidikan karakter siswa telah berhasil dilaksanakan. DIY telah mampu mengimplementasikan sebesar 100% dari target 2016. Capaian ini meningkat dari tahun 2015 sebesar 29,17% menjadi 35,83% ditahun 2016.

Kinerja peningkatan mutu pendidikan dapat terlihat dari angka mengulang dan putus sekolah, peningkatan angka kelulusan, peningkatan jumlah guru yang tersertifikasi, dan peningkatan kondisi kualitas fasilitas sekolah yang semakin baik dari capaian tahun sebelumnya. Akumulasi dari beberapa parameter tersebut memperlihatkan nilai mutu pendidikan. Capaian nilai mutu pendidikan tahun 2016 sebesar 84,96%. Capaian ini telah memenuhi 113,02% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2016.

Sebanyak 2075 peserta didik telah mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar di tahun 2016. Nilai ini telah melampaui jumlah peserta yang ditargetkan atau telah memenuhi 104,91% dari target. Jumlah peserta yang mendapatkan pelayanan telah meningkat dari capaian ditahun 2015 sebesar 1.912 siswa. Peningkatan jumlah peserta ini dicapai dengan memperluas layanan diklat tidak hanya untuk siswa SMK dan guru SMK, namun juga melayani mahasiswa teknik dan karyawan perusahaan.

## 2) Urusan Perpustakaan.



**Gambar 1 Pojok Baca di RS. Bethesda**

Salah satu sasaran utama kegiatan pada urusan ini adalah untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Pemda DIY melakukan sejumlah promosi perpustakaan yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan media cetak, media audio visual serta lomba pemustaka. Tahun

2015, Pemda DIY mengembangkan Pojok Baca yang dikembangkan

dan dilaksanakan di 5 Rumah Sakit, yakni RSUP Dr. Sardjito, RS Condongcatur Sleman, RSUD Kota Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah Gamping dan RS Bethesda. Tujuan Pojok Baca adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dan mengakses buku bacaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan atau disebut pemustaka di DIY hingga akhir Tahun 2016 tercatat mencapai 926.174 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 2.397.591 jiwa yang maka didapat kesimpulan bahwa terdapat 38,60% pemustaka yang tahun 2016. Jumlah persentase tersebut sudah melebihi target yang dicanangkan pada tahun 2016 sebesar 22% atau setara dengan 849.747 orang. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2016 ini adalah adanya Pojok Baca, dimana pada Tahun 2016 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY menambah 5 (lima) titik lokasi Pojok Baca di lembaga yang ramai dikunjungi oleh masyarakat yaitu: Kantor Pos Besar Yogyakarta, Kantor Pelayanan SAMSAT terpadu kota Yogyakarta, Kantor Pelayanan SAMSAT terpadu Kabupaten Kulon Progo, BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan BPJS Kesehatan Yogyakarta.

### 3) **Urusan Kesehatan.**

Pembangunan kesehatan di DIY secara nyata telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, posisi DIY masih menduduki peringkat atas dalam pencapaian target indikator kesehatan. Capaian pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah kasus kematian bayi dan balita mengalami penurunan. Namun demikian kasus kematian ibu dan jumlah bayi dengan berat badan lahir yang rendah (BBLR) angkanya fluktuatif. Hal ini perlu diwaspadai.

**Tabel 2. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan**

No.	Uraian	2014	2015	2016
1.	Jumlah kasus kematian ibu	40	29	39
2.	Jumlah kasus kematian bayi	405	329	278
3.	Jumlah kasus kematian balita	454	378	323
4.	Jumlah Bayi dengan berat badan lahir yang rendah (BBLR)	5,06%	5,32%	5,20%

Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau merupakan salah satu faktor yang mencegah kasus kematian ibu, bayi, dan balita sekaligus mendukung Angka Harapan Hidup. Sampai tahun 2016, DIY telah memiliki 66,12% Puskesmas yang terakreditasi dan 44,74% RS terakreditasi dengan versi terbaru (Dinas Kesehatan, 2017). Dari jumlah penduduk 3.720.900 jiwa

(BPS, 2017), DIY memiliki dokter umum sebanyak 847 orang, perawat sebanyak 6.353 orang, dan bidan 1.508 orang (BPPSDMK Kemenkes RI, 2017).

Indikator sasaran Prevalensi Balita Kurang Gizi (KEP), dari target tahun 2016 sebesar 6,8%, terealisasi 8,80% (capaian 70,59%), atau dengan kata lain target 2016 tidak tercapai. Apabila dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD DIY yang sebesar 6,5, maka capaiannya sebesar 64,62%. Prevalensi KEP sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2015 prevalensi KEP mengalami sedikit peningkatan dari 7,91% tahun 2014 menjadi 8,04% dan pada 2016 meningkat lagi menjadi 8,8%. Peningkatan prevalensi KEP disebabkan oleh banyak faktor. Komponen kesehatan yang turut berperan adalah bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) sebesar 5,20% dan bayi lahir pendek sebesar 11%, adanya penyakit penyerta seperti kelainan *congenital* (bawaan sejak lahir) misalnya jantung bawaan, *hydrocephalus*, *down syndrome* dan *cerebral palsy*. Di samping itu juga dipengaruhi oleh gangguan pertumbuhan dan penyakit infeksi seperti TB anak dan *bronkopneumonia*. Kelainan dan kondisi bayi di atas terjadi karena kurangnya kualitas kesehatan ibu dari sejak remaja sampai masa setelah persalinan. Kualitas kesehatan ibu dipengaruhi oleh tingkat konsumsi. Berdasarkan hasil survey diet total tahun 2014 tingkat konsumsi ikan dan olahannya DIY terendah secara nasional, yaitu 20,3%, dan tingkat konsumsi pada wanita usia 15-55 tahun sebesar 46,4% kurang dari standar. Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) dan Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) menunjukkan 51,2% ibu hamil mengkonsumsi makanan kurang dari standar. Di samping itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita juga masih cukup rendah. Hanya 79,09% masyarakat yang datang dan menimbang balitanya di Posyandu.

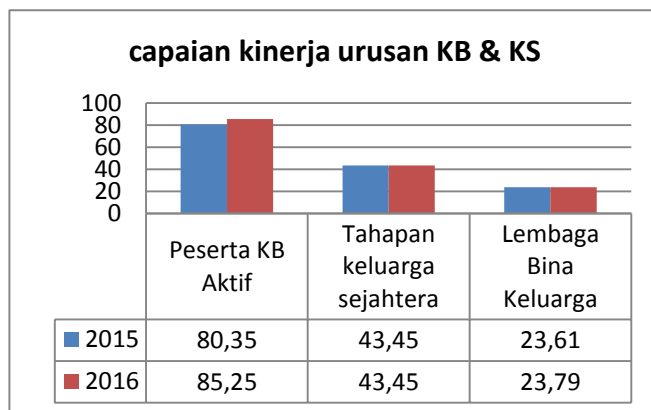
Indikator persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan sasaran sebagai indikator tahun 2016 ditargetkan sebesar 65,68% realisasi 81,62% atau telah mencapai 124,26%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017 tercapai 101,13%. Keberhasilan capaian indikator didukung oleh beberapa faktor antara lain: meningkatnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan kemitraan dengan swasta, ormas, LSM, organisasi profesi dan masyarakat dalam mendukung program pengendalian penyakit. Ada beberapa penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian yaitu DBD, pneumonia, TB paru, dan diare. Di sisi lain Penyakit Tidak Menular (PTM) juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Hasil Riskesdas tahun 2013 telah menunjukkan prevalensi hipertensi, *diabetes mellitus*, kanker dan asma melebihi angka nasional. Peningkatan jumlah penyakit menular yang dan tidak menular banyak

dipengaruhi oleh faktor perilaku, pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktifitas fisik dan menurunnya kualitas lingkungan.

#### 4) **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.**

Pada urusan ini, persentase cakupan peserta KB Aktif pada tahun 2016 sudah tercapai melebihi target, yaitu sebesar 85,25% dari target 80,222%. Kinerja cakupan peserta KB Aktif naik 4,90% dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 80,35%. Sedangkan persentase Penurunan PUS yang Usia Istri di bawah 20 tahun ditargetkan sebesar 0,505% dengan capaian sebesar 0,240%.

Keluarga dikategorikan dalam 5 tahapan keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga sejahtera I, Keluarga sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Pada tahun 2016 target dari persentase tahapan Keluarga



Sejahtera adalah sebesar 43,40% dengan capaian sebesar 43,45%. Capaian kinerja ini sama dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 43,45%. Indikator ini bersifat menurunkan jumlah keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I dan Sejahtera II menuju Keluarga

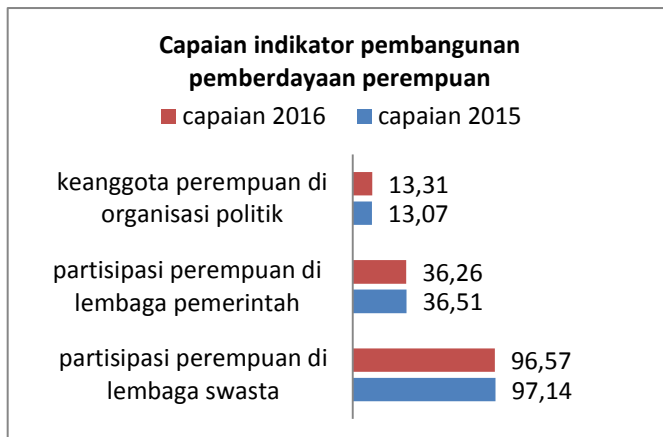
Sejahtera, kinerja indikator ini sudah melebihi target karena dukungan dari : sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian, peningkatan peserta KB Baru dan KB aktif, peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan, upaya pengembangan kegiatan UPPKS serta partisipasi dari institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP). Partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera juga sangat besar, bentuk partisipasi kelompok masyarakat dapat dilihat dari adanya kelompok bina keluarga berkategori percontohan. Pada tahun 2016 target persentase lembaga bina keluarga berkatagori percontohan adalah sebesar 23,63% dengan capaian sebesar 23,79% atau naik 0,18% dari tahun 2015 sebesar 23,61%.

#### 5) **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian integral dalam pembangunan DIY. Kesetaraan gender antara lain dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta, partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah dan keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik. Pada tahun 2016 tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah sebesar 96,57%. Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah sebesar 37,26%, sedangkan persentase keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik adalah sebesar 13,31%.

Untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka sangat diperlukan adanya dukungan dari organisasi-organisasi perempuan yang ikut berperan aktif. Tugas pemerintah dalam hal ini memberikan pembinaan kepada organisasi perempuan. Pada tahun 2016 persentase pembinaan organisasi perempuan adalah sebesar 87,76% dari target 87,65%.



Beberapa upaya yang dilakukan Pemda DIY terkait pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan anak, antara lain menyusun kebijakan afirmatif dalam rangka pembangunan berprespektif gender, advokasi dan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan,

memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak melalui regulasi dan fasilitasi korban. Pada tahun 2016 rasio korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 0,48 orang dari target 0,47, sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak sebanyak 0,47 anak dari target 0,37.

## 6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

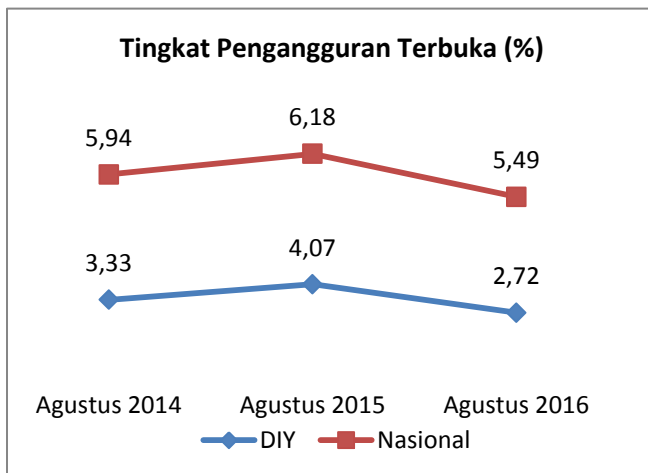
Keberdayaan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari persentase cakupan pembinaan organisasi masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berprestasi. Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat pada tahun 2016 mempunyai target sebesar 33,19% dengan capaian sebesar 93,70%.

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan melalui inisiasi, pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Asli Desa. Persentase Desa yang telah membentuk

BUMDes pada tahun 2016 mempunyai target sebesar 38,26% dengan capaian sebesar 38,78%. Sedangkan persentase desa/kelurahan yang telah memiliki profil desa/kelurahan sebesar 100% dengan target yang ditentukan sebesar 85%.

## 7) Urusan Ketenagakerjaan.

Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2016 mencapai 2.099.436 orang yang terbagi menjadi penduduk yang bekerja 2.042.400 orang (97,28%) dan penganggur sebanyak 57.036 orang (2,72%). Jumlah angkatan kerja tersebut meningkat 127.973 orang dari kondisi bulan Agustus tahun 2015 dimana Angkatan Kerja sebanyak 1.971.463 orang yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 1.891.218 orang (95,93%) dan penganggur 80.245 orang (4,07%), sehingga jumlah penganggur mengalami penurunan sebanyak 23.209 orang.



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY pada Agustus 2016 sebesar 71,96 persen, mengalami peningkatan 2,58% jika dibandingkan keadaan Agustus 2015 sebesar 68,38% dengan 3 (tiga) sektor tertinggi yaitu 1) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,89%), 2) Sektor

Pertanian (23,27%) dan 3) Sektor Jasa-jasa (20,75%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY pada Agustus 2016 mencapai 2,72%, mengalami penurunan 1,35% dibanding TPT Agustus 2015 sebesar 4,07%. Angka ini lebih rendah dibanding TPT Nasional sebesar 5,49% pada Agustus 2016.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Pada tahun 2016 meningkat dari posisi ketiga nasional dengan Nilai 64,80 di tahun 2015 menjadi peringkat dua nasional dengan nilai 67,92 di bawah DKI Jakarta dengan nilai 68,92.

## 8) Urusan Kebudayaan.

Setelah disahkannya UU RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, pemajuan kebudayaan DIY semakin memperlihatkan kecenderungan yang semakin maju dan berada pada jalur yang tepat. Kebudayaan sebagai salah satu potensi utama DIY diharapkan menjadi penggerak pemajuan sektor lain di



DIY, dengan kata lain pemajuan potensi budaya akan mendorong sektor pariwisata, perindustrian dan perdagangan bergerak lebih cepat lagi.

Indikator pemajuan Kebudayaan di DIY memperlihatkan ketercapaian bahkan melampaui angka 100%. Persentase Jumlah Organisasi Budaya dan Desa Budaya kategori maju tercapai melebihi target yang direncanakan pada tahun 2016 dengan realisasi 3 unit dari target 2 unit. Hal ini didukung oleh fasilitasi *event* seni dan upacara adat yang merata di 438 desa dan pendampingan budaya di 80 desa serta adanya berbagai pelatihan, *workshop*, dan sarasehan untuk meningkatkan kualitas berkesenian.

Persentase Nilai Budaya, Adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi di dalamnya mencakup seni (seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni multimedia & media rekam, seni desain dan arsitektur), kuliner, dan industri budaya. Keberhasilan memenuhi target dalam indikator ini didukung oleh keberhasilan *event* budaya yang semarak dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Penggerak partisipasi masyarakat juga tidak lepas dari peran serta pendamping budaya dan fasilitasi terhadap *event* budaya dan upacara adat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY. Pencapaian kinerja yang ditargetkan 20% dapat terlampaui, yakni 20,30%.

Indikator Persentase Ruang Seni dan Budaya Yang Representatif merupakan salah satu indikator pemajuan kebudayaan DIY. Banyaknya jumlah ruang seni yang representatif menandakan semaraknya aktivitas kebudayaan di DIY. Sarana dan Prasarana Budaya, di dalamnya mencakup Prasarana (regulasi, standarisasi, fasilitasi teknologi), dan Sarana (desa/kelurahan budaya, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan non formal, balai pertemuan adat). Pada tahun 2016 realisasi capaiannya adalah 55,14% dari target 55%. Ruang seni yang representatif semakin terwujud setelah adanya rehabilitasi Taman Budaya Yogyakarta, pembangunan Taman Budaya Kulonprogo, dan pembangunan balai budaya di desa – desa budaya di DIY.



**Gambar 2 . Dialog Budaya dan Gelar Seni 'Yogya Semesta'**

Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya telah dilakukan di tahun 2016 di beberapa titik, salah satunya yaitu rehabilitasi masjid Mataram Kotagede, Kawasan Tugu Pal Putih, pemeliharaan Jagang, Lokomotif Bimokunting di Beteng Vredenburg, pemeliharaan 2 Joglo Kotagede, pemeliharaan Masjid Gede

Kraton dan pemeliharaan rumah Bupati Puralaya serta beberapa pelestarian struktur dan bangunan cagar budaya yang lain. Warisan budaya tak benda merupakan warisan yang tak kalah berharga dan penting karena merupakan jati diri masyarakat DIY. Pada bulan Oktober 2016 DIY memperoleh 9 penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Indikator Persentase Implementasi Hasil Kesepakatan merupakan cara mengukur keberhasilan diplomasi budaya yang dilakukan di dalam negeri dan mancanegara. Pada tahun 2016 realisasi dari indikator ini adalah 20,30% melebihi target sebesar 20% dan diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2017 diproyeksikan semua hasil kesepakatan kerjasama dapat ditindaklanjuti dengan implementasi nyata. Pada tahun 2016 implementasi kerjasama dapat terlihat dari terselenggaranya acara *Melbourne Symphony Orchestra* yang merupakan tindak lanjut dari kerjasama DIY dengan Australia. Keberhasilan capaian indikator ini didorong oleh kegiatan fasilitasi misi kebudayaan dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya, membangun kemitraan dengan instansi, dan membangun kemitraan dengan lembaga pelestari budaya.

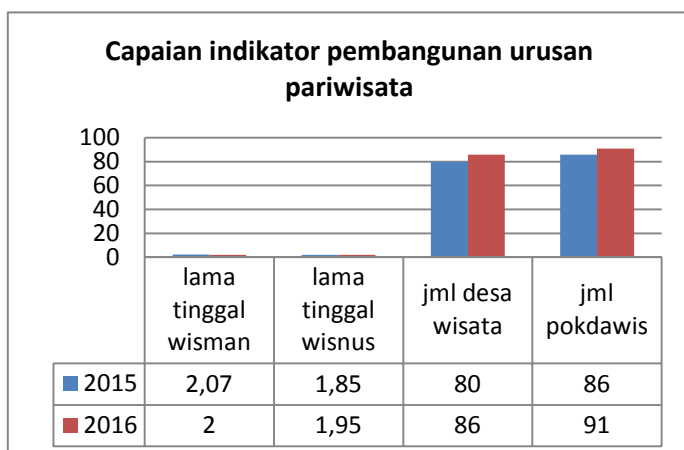
Pencapaian misi kedua, **"Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif"**, meliputi urusan pariwisata, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan perindustrian.

### **1) Urusan Pariwisata.**

Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai 3.813.720 orang, dan pada tahun 2016 kunjungan wisatawan nusantara bertambah sebanyak 380.541 orang (naik 9,98%), sehingga pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara telah mencapai 4.194.261 orang dan telah melebihi target indikator kinerja tahun 2016.

Capaian lama tinggal wisatawan mancanegara, pada tahun 2016 adalah 2 hari dan 1,95 hari untuk wisatawan nusantara, sedangkan pada tahun 2016 ini dengan target lama tinggal wisman 2,45 hari hanya dapat terealisasi sebesar 2 hari, dan bila dibandingkan dengan tahun 2015 (2,07 hari) menurun 0,07 hari.

Lama tinggal wisatawan nusantara dengan target 2,40 hari hanya terealisasi 1,95 hari jika dibandingkan dengan tahun 2014 (1,85 hari) meningkat 0,10 hari. Diperlukan strategi untuk mendongkrak lama tinggal wisatawan yang mengunjungi DIY. Salah satu strategi itu yakni perlu memotivasi dan memfasilitasi kalangan swasta agar lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya wisata malam di sehingga dengan wisata malam yang sehat dan nyaman, wisatawan akan lebih lama lagi tinggal di Yogyakarta.



Tahun 2015 terdapat 80 desa/kampung wisata dan 86 kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 85 desa/kampung wisata dan 91 Pokdarwis. Pada tahun 2016 Dinas Pariwisata berhasil menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SDM

dan kelembagaan pariwisata. Kegiatan rutin yang selalu diadakan di setiap tahunnya adalah penyelenggaraan lomba desa wisata, lomba POKDARWIS tingkat provinsi, pelatihan, dan sertifikasi pemandu wisata.

## 2) Urusan Penanaman Modal.

Investasi di DIY tumbuh 7,61% dari tahun 2015 sebesar Rp 11.223.403.242.074,- menjadi Rp 12.077.661.664.802,- di tahun 2016 yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 4.522.819.693.467,- dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 7.554.841.971.335,-. Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 314 perusahaan, yang terdiri dari 164 PMA dan 150 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 98.546 TKI dan 609 TKA. Pada tahun 2016, bidang usaha 3 (tiga) terbesar penyumbang investasi di DIY, yaitu Perusahaan PMA di bidang Jasa Rekreasi, bidang Industri Pengolahan Es Krim, dan bidang Industri *Furniture* Kayu, sedangkan di Perusahaan PMDN yaitu bidang Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, bidang *Real Estate*, dan bidang Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan.

**Tabel 3. Perkembangan Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2012-2016**

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	Total Investasi PMA+PMDN (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
2012	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759	632.488.121.751
2013	2.864.654.491.755	5.203.115.642.883	8.067.770.134.638	1.011.703.992.879
2014	3.568.546.291.755	5.955.853.842.883	9.524.400.134.638	1.456.630.000.000
2015	3.951.662.458.339	7.271.740.783.735	11.223.403.242.074	1.699.003.107.436
2016	4.522.819.693.467	7.554.841.971.335	12.077.661.664.802	854.258.422.728

Sumber : BKPM DIY Tahun 2017

### **3) Urusan Ketahanan Pangan.**

Capaian skor PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2016 adalah 88,5, lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 85,2 dari target akhir RPJMD 2017. Tercapainya indikator skor PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin membaik dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Pencapaian target skor PPH juga didukung melalui usaha pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan diversifikasi produk antara, dan peningkatan sosialisasi maupun promosi panganeekaragaman konsumsi pangan lokal.

Pemantapan ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun dari impor. Untuk ketersediaan energi dan protein berturut-turut sebesar 3.666 kkal/kapita/hari dan 111,09 gr/kapita/hari, telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan yaitu sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gr/kapita/hari.

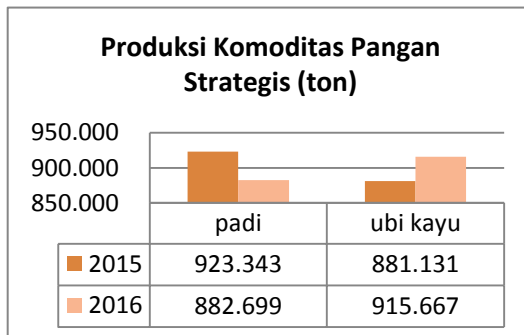
Cadangan pangan (pemerintah dan masyarakat) juga cukup banyak, tahun ini mencapai 517,161 ton beras. Cadangan pangan ini dapat dimanfaatkan jika terjadi kerawanan pangan. Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitas diberikan kepada GAPOKTAN di daerah rawan pangan dan di daerah sentra produksi pangan untuk menjaga kestabilan harga pangan.

Angka konsumsi energi di DIY adalah 2.133,8 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein 63,9 gr/kapita/hari. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan 2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari maka tingkat konsumsi energi di DIY masih perlu ditingkatkan, terutama konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal terutama umbi-umbian menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi.

Keberhasilan pencapaian ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut secara sinergis telah mendukung upaya penurunan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY. Desa Rawan Pangan di DIY turun dari 20 desa di tahun 2015 menjadi 16 desa di tahun 2016. Keberadaan Desa Rawan Pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul 3 desa, Kabupaten Kulon Progo 6 desa, dan Kabupaten Gunungkidul 7 desa.

#### 4) Urusan Pertanian.

Sektor pertanian tetap diharapkan berkontribusi besar dalam perekonomian DIY mengingat kontribusi peluang kerja di sektor ini masih besar di samping luasan lahan pertanian terutama lahan kering di DIY masih signifikan.



Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2016 sebesar 2.597.138 ton telah melebihi target dan meningkat sebesar 0,17% dibandingkan dengan tahun 2015. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 2.597.138 ton terdiri dari capaian produksi tanaman pangan

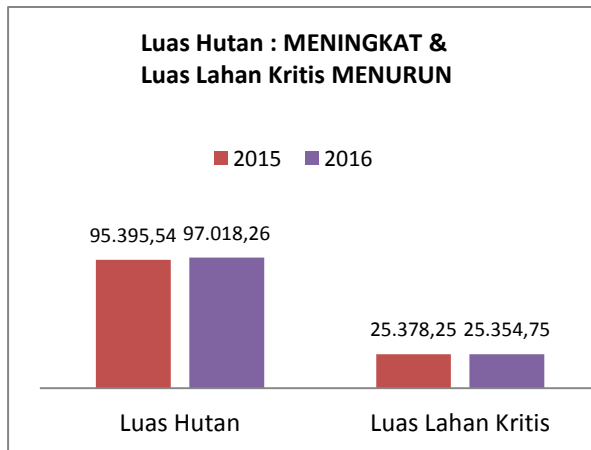
sebesar 2.204.717 ton dan capaian produksi hortikultura sebesar 392.421 ton.

Peningkatan produksi tanaman pangan 2.204.717 ton didukung oleh pencapaian produksi jagung sebesar 310.257 ton pipil kering melampaui target (299.084 ton), begitu juga produksi ubi kayu tahun 2016 sebesar 915.667 ton dari target 873.362 ton. Walaupun demikian produksi komoditas padi mengalami penurunan, dimana produksi padi 2016 sebesar 882.699 ton GKG dari target 945.136 ton. Penurunan produksi padi antara lain disebabkan oleh penurunan produktivitas padi sawah dan padi ladang selama tahun 2016. Produktivitas padi sawah menurun karena intensitas hujan tinggi sehingga mengganggu penyerbukan dan pengisian bulir (banyak bulir hampa). Sedangkan produktivitas padi ladang turun yang terjadi pada SR-1 karena pada saat pertumbuhan awal pada SR-1 tidak ada hujan selama 14 hari, kemudian hujan turun 1-2 hari, setelah itu tidak ada hujan sampai dengan pembungaan.

Kenaikan populasi komoditas ternak total di DIY relatif kecil, realisasi indikator populasi ternak tahun 2016 sebesar 620.516 animal unit dibandingkan tahun 2015 sebesar 607.812 animal unit, mengalami kenaikan sebesar 12.704 animal unit (2,09%). Kendala dalam upaya peningkatan populasi ternak antara lain belum terbebasnya penyakit AI pada ternak unggas dan target bebas AI di DIY pada tahun 2020; keterbatasan penyediaan pakan hijauan ternak; sekitar 70% total sapi potong sudah mengalami persilangan yang menyebabkan gangguan reproduksi; kebijakan pemerintah yang membatasi mutasi ternak betina produktif antar daerah sehingga tidak dapat memperoleh indukan yang berkualitas dari daerah lain. Berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya peningkatan populasi ternak khususnya sapi potong antara lain dengan peningkatan produksi semen beku dan melakukan Inseminasi Buatan (IB).

## 5) Urusan Kehutanan.

Dari 318.518 Ha luasan DIY, 97.018,26 Ha adalah hutan yang terdiri dari hutan rakyat seluas 78.303,20 Ha dan hutan negara seluas 18.715,06 Ha. Dengan demikian maka prosentase luasan hutan di DIY mencapai sebesar 30,45% dari total luas DIY.



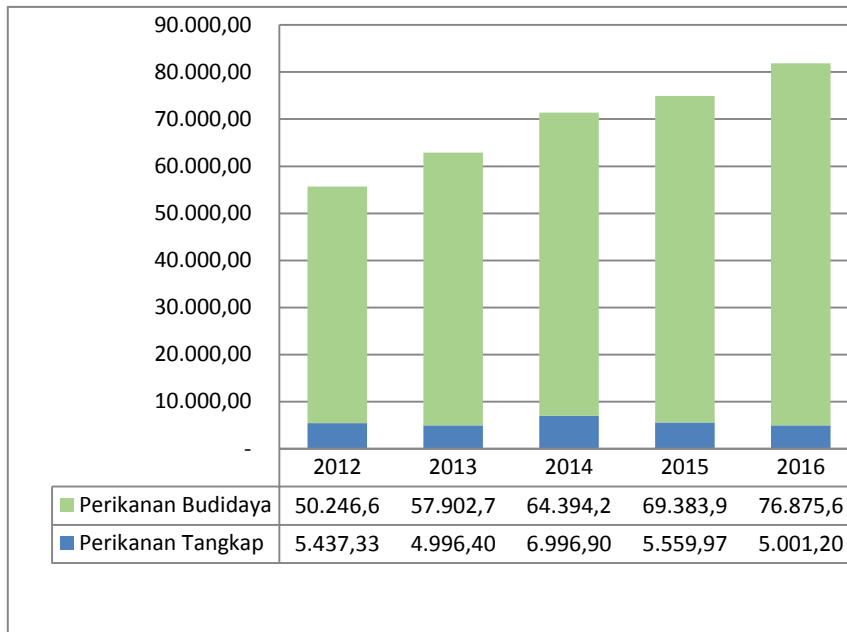
Pada tahun 2016, persentase luas hutan di DIY meningkat sebesar 30,45%. Peningkatan ini telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 27,77%. Total luas hutan pada tahun 2016 adalah 97.018,26 Ha, meningkat dibandingkan tahun 2015 dengan luas 95.395,06 Ha. Kabupaten Gunungkidul memiliki peningkatan

luasan hutan rakyat tertinggi, dari yang awalnya seluas 42.569,96 Ha pada tahun 2015 menjadi 44.110,87 Ha pada akhir tahun 2016 atau meningkat seluas 1.540,91 Ha. Peningkatan luas hutan rakyat tersebut juga memberikan implikasi adanya penurunan luas lahan kritis. Luas lahan kritis di DIY tahun 2016 sebesar 25.354,75 Ha turun 23,5 Ha dibandingkan tahun 2015.

Produksi kayu di DIY pada tahun 2016 memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan produksi hasil hutan. Jumlah produksi kayu pada tahun 2016 adalah sebesar 177,81 m<sup>3</sup> yang terdiri dari kayu yang dihasilkan dari tebangan terencana sebanyak 119,73 m<sup>3</sup>, dan kayu hasil sitaan barang bukti serta kayu roboh akibat bencana alam sebesar 58,08 m<sup>3</sup>. Hasil produksi ini meningkat sebanyak 39,69 m<sup>3</sup>.

## 6) Urusan Kelautan dan Perikanan.

Produksi perikanan di DIY dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sejak tahun 2011 hingga 2016. Realisasi produksi perikanan budidaya dan tangkap tahun 2016 sebesar 81.876,80 ton dari target sebesar 86.600 ton dengan realisasi sebesar 94,55% dari target yang terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 76.875,60 ton dan produksi perikanan tangkap sebanyak 5.001,20 ton.



Realisasi produksi perikanan budidaya dan tangkap tahun 2016 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6.932,91 ton. Realisasi produksi perikanan budidaya dan tangkap tahun 2016 mencapai 84,50% dari target

akhir RPJMD tahun 2017.

## 7) Urusan Industri.

Tahun 2016 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 13,21% dalam struktur PDRB DIY. Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk DIY dan penyerapan tenaga kerja.

Jumlah IKM DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan jumlah IKM DIY setiap tahunnya sebesar 2,76%. Pada tahun 2016 jumlah IKM meningkat sebesar 2,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,24% dari sebesar 326.669 orang pada tahun 2015 menjadi 333.980 orang pada tahun 2016.

**Tabel 4 Perkembangan IKM di DIY Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Jumlah Unit Usaha</b>	81.523	84.234	86.087	88.637	90.906
<b>Penyerapan Tenaga Kerja (orang)</b>	300.539	310.173	318.858	326.669	333.980
<b>Nilai Investasi (Rp. Juta)</b>	1.010.585	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897
<b>Nilai Produksi (Rp. Juta)</b>	3.199.224	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222
<b>Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp. Juta)</b>	1.388.023	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631

*Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2017*

Peningkatan nilai produksi pada tahun 2016 adalah sebesar 4,40% dibandingkan dengan tahun 2015 atau dari sebesar Rp 3.489.769 Juta pada tahun 2015 menjadi Rp 3.643.222 Juta pada tahun 2016.

Misi ketiga, **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**, didukung oleh urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 Pemda DIY telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Oleh karena itu Opini Pemeriksaan BPK tahun 2016 yang akan dinyatakan pada bulan April-Mei 2017 yang akan datang diharapkan tetap WTP. Kunci sukses untuk bisa mempertahankan opini WTP dari BPK ialah karena pemerintah daerah konsisten menindaklanjuti catatan dari BPK. Pencapaian WTP ini tidak dapat dipisahkan dari aspek pengendalian internal yang merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas



**Gambar 3. Penyerahan LHP BPK**

pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik.

Faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan

penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2016 Inspektorat DIY telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 180 obyek pemeriksaan dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 terhadap 42 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY dan pemeriksaan reguler terhadap pemerintah kabupaten/ kota se DIY sejumlah 10 SKPD. Hasil pemeriksaan sampai dengan bulan Nopember tahun 2016 terdapat 345 temuan dengan 799 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 658 rekomendasi (82,35%). Adapun 141 rekomendasi (17,65%) baru dalam proses tindak lanjut. Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah DIY tahun 2015 dengan temuan 9 temuan 20 rekomendasi, telah ditindak lanjuti 20 (100%) sedangkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 dengan 25 temuan 35 rekomendasi, telah



ditindak lanjuti 35 (100%). Sehingga secara keseluruhan pemeriksaan APIP dan BPK telah ditindaklanjuti 100%.

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, antara lain dilakukan pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan. Selain itu juga telah melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi aparatur Pemda DIY. Pengelolaan SDM yang merupakan kunci dalam manajemen perubahan di Pemda DIY, salah satunya dilakukan dengan pengembangan sistem rekrutmen pegawai berbasis kompetensi, pengembangan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan rapor triwulan SKPD.

Pencapaian misi keempat, **“Memantapkan Prasarana dan Sarana Daerah”**, meliputi urusan perhubungan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan perumahan.

### **1) Urusan Perhubungan.**

Arah kebijakan urusan perhubungan dilakukan melalui meningkatkan penataan sistem transportasi di DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% pada tahun 2012 menjadi 42,57% pada tahun 2017 dan peningkatan akses di perdesaan. Untuk mendukung arah kebijakan ini telah ditetapkan 2 indikator kinerja sasaran yakni penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan dan peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi.

Target indikator Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum Perkotaan sebesar 9.750 penumpang per hari diukur melalui capaian pelayanan angkutan umum perkotaan reguler dan angkutan Trans Jogja. Pada Tahun 2016, jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan adalah sejumlah 9.268 penumpang perhari atau mencapai 95,1% dari target sebesar 9.750 penumpang per hari.

Beberapa faktor tersebut mengakibatkan jumlah penumpang yang terlayani oleh angkutan reguler hanya sebanyak 444 penumpang per hari. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2016 yang dilayani melalui angkutan perkotaan dengan sistem buy the service (Trans Jogja) mencapai 9.268 penumpang per

hari. Hal ini dicapai dengan penyelenggaraan operasional Trans Jogja sebanyak 8 jalur dengan 67 armada.



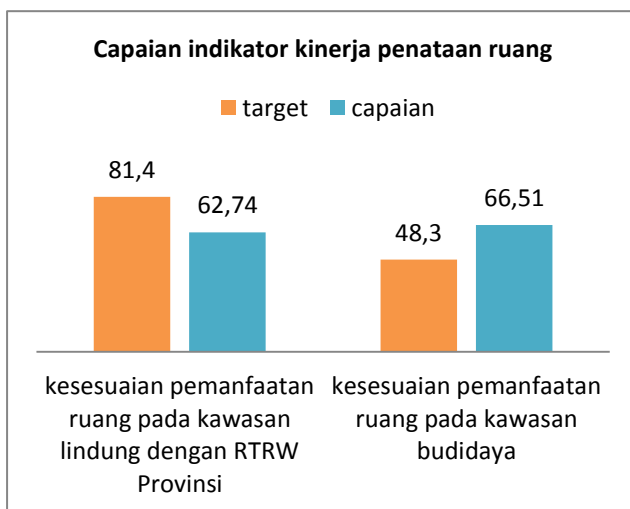
**Gambar 4. Dua puluh lima Bus Baru Trans Jogja Siap Diluncurkan**

Penyebab tidak terpenuhinya target di Tahun 2016 untuk angkutan Trans Jogja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) *Time Table* Operasional Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat dan (2) Kondisi bus banyak yang sudah masuk usia peremajaan sehingga sering mengalami kerusakan. Kedua faktor tersebut mengakibatkan penurunan km

tempuh armada Trans Jogja sebesar 165.533.583 km dari tahun 2015 sebesar 6.089.208.097 km. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pada tahun 2016 sudah dilakukan peremajaan armada Trans Jogja sebanyak 25 unit, namun masih ada 29 armada yang perlu diremajakan. Selain itu untuk peningkatan pelayanan Trans Jogja juga telah dilakukan pengadaan halte baru sebanyak 5 unit, pengadaan atap pelindung halte portable sebanyak 16 unit dan prasarana operasional Trans Jogja seperti mesin aktivasi (Top UP EDC) sebanyak 48 unit, microcontroller sebanyak 100 unit, perangkat olah data sebanyak 74 unit dan printer tiket Trans Jogja di halte sebanyak 20 unit dan di dalam bus sebanyak 8 unit.

## 2) Urusan Penataan Ruang.

Kinerja capaian sasaran tersebut diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu :

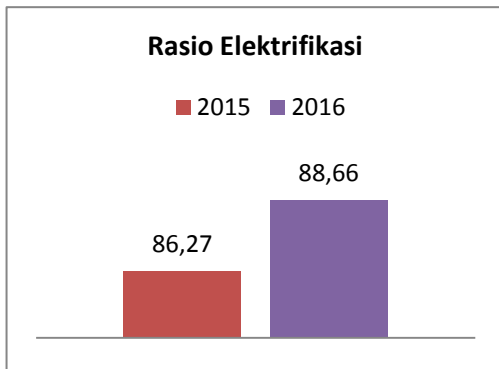


meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW Provinsi; dan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan RTRW Provinsi. Tahun 2016 diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 62,74%, capaian tersebut dibawah target yang ditetapkan

sebesar 81,40%.

Tahun 2016 diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di DIY sebesar 66,51%, capaian tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 48,30%. Hal ini didukung dengan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan pertanian lahan kering dan permukiman perdesaan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2016 telah mencapai 137,13%. Ketidaksesuaian tertinggi berupa kawasan industri yang belum terwujud karena masih berupa permukiman, pertanian dan perkebunan.

### 3) Urusan Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM).



Pada akhir tahun 2015, pencapaian rasio elektrifikasi di DIY adalah sebesar 86,27% atau terdapat 952.712 Rumah Tangga telah berlistrik dari total sebesar 1.104.405 Rumah Tangga di seluruh DIY. Sedangkan realisasi pencapaian rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2016 sebesar 88,66% atau terdapat 989.145 Rumah Tangga yang telah berlistrik dari total

sebesar 1.116.918 Rumah Tangga di seluruh DIY melalui penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 37.561 RT yang meliputi (a) pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2016, sebanyak 500 RT; (b) pelaksanaan program dan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 265 RT; dan (c) dari dana PLN dan swadaya masyarakat, sebanyak 36.796 RT.

Pada tahun 2016 pemenuhan bahan bakar minyak dan gas sudah mencapai 100%. Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas untuk rumah tangga di DIY sebagian besar dipasok oleh PT. Pertamina (Persero). Berdasarkan capaian ratio elektrifikasi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar maka capaian kinerja penduduk berakses energi pada tahun 2016 sebesar 94,33% atau telah mencapai 101,23% dari target. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017, telah mencapai 100,35%.

### 4) Urusan Lingkungan Hidup.

Sasaran indikator kinerja utama bidang lingkungan hidup adalah kualitas lingkungan hidup meningkat dengan target 12,58%. Adapun capaian

persentase peningkatan kualitas lingkungan sebesar 9,40% dengan tingkat capaian 74,72%.

Kadar rata-rata BOD air sungai pada tahun 2016 pada pemantauan 10 sungai adalah rata-rata sebesar 7,86 mg/l dari target yang ditetapkan <8,1 mg/l, tercapai 100%. Kadar COD rata-rata air sungai adalah 16,32 mg/l dari target <45 mg/l, tercapai 100%. Sedangkan kadar Koli rata-rata 132.666,7 MPN/100 ml dari target yang ditetapkan <175.000 MPN/100 ml, tercapai 100%.

Peningkatan kualitas udara ambien telah mencapai target 100%, terdiri dari komponen parameter CO dan HC. Realisasi capaian parameter *Carbon*

*Monoksida* (CO) dengan nilai rerata 951,37  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dari target yang ditetapkan <8.000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , tercapai 100%. Realisasi capaian parameter *Hidro Carbon* (HC) dengan nilai rerata 19,99  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dari target yang ditetapkan <130  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , tercapai 100%.



**Gambar 5. Pembangunan Telagadesa**

Penurunan kerusakan lahan pada tahun 2016 tercapai 53 hektar telah jauh melampaui target 9,7 hektar.

Tercapainya target penurunan kerusakan lahan didukung oleh kegiatan penghijauan lahan kritis, reklamasi bekas tambang, Wanadesa, dan Telagadesa.

## 5) **Urusan Pekerjaan Umum (PU).**

Kebutuhan jalan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi di DIY sepanjang 1.007,32 Km. Hingga akhir tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan jalan tersebut telah terbangun jalan sepanjang 931,48 Km yang terdiri atas jalan negara sepanjang 247,91 km, jalan propinsi sepanjang 619,34 Km, jalan Selokan Mataram yang telah ditingkatkan struktur dan kapasitasnya sepanjang 9,34 Km dan jalan jalur pantai selatan (Pansela) sepanjang 54,95 Km. Dengan demikian aksesibilitas jalan di wilayah provinsi hingga tahun 2016 tercapai 92,48% telah melampaui target sebesar 88%.



**Gambar 5. Jalan Jalur Pantai Selatan (Pansela) Bantul.**

Hingga akhir tahun 2016 melalui program pengembangan pengelolaan air minum, program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya serta dukungan APBN Ditjen Cipta Karya melalui kegiatan pembangunan SPAM IKK dan Optimalisasi SPAM IKK dan dukungan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum yang tersebar di lima kabupaten/ kota di DIY, penduduk berakses air minum sejumlah 3.172.982 jiwa atau setara dengan 85,22% dari total penduduk DIY. Capaian tersebut telah melampaui 101,11% dari target tahun 2016 sebesar 84,34%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 mencapai 97,08%.

Melalui Program Penyediaan Air Baku telah dibangun 1 buah embung di Kabupaten Kulon Progo dengan debit sebesar 10 liter/detik dan 1 buah embung di Kabupaten Sleman dengan debit sebesar 270 liter/detik sehingga dapat diperoleh tambahan ketersediaan air baku sebesar 280 liter/detik. Atas dukungan APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun 14 unit telaga di Kabupaten Gunungkidul, yang mampu menyediakan air baku sebesar 22,24 liter/detik.

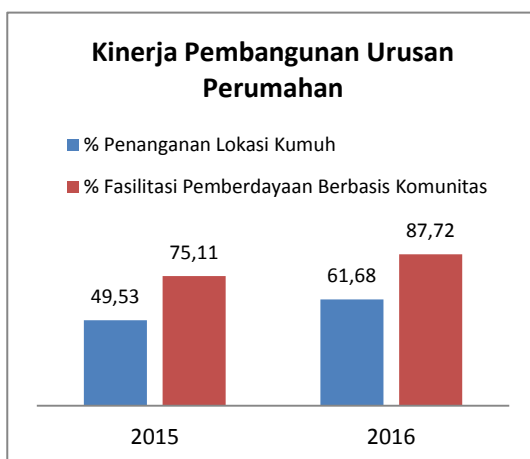
Sementara itu, capaian jumlah penduduk berakses sanitasi layak pada tahun 2016 sejumlah 3.308.527 jiwa atau setara dengan 88,91% dari total penduduk DIY. Capaian tersebut telah melampaui 104,61% dari target tahun 2016 sebesar 85% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 mencapai 98,79%.

## 6) Urusan Perumahan.

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan kepada masyarakat. Hasil identifikasi awal pada tahun 2012

jumlah rumah yang tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 91.200 unit. Hingga tahun 2015 jumlah RTLH yang tersebar di DIY sejumlah 74.491 unit atau setara dengan 7,17%.

Total RTLH yang ditangani pada tahun 2016 sejumlah 3.078 unit yang terdiri dari penanganan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian



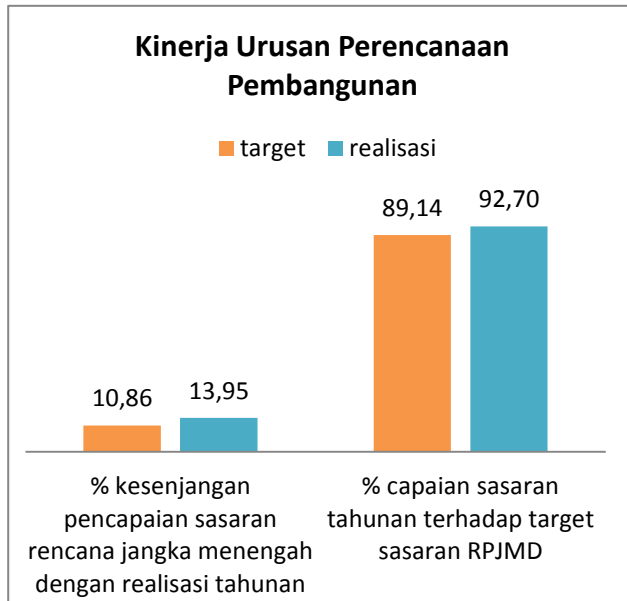
secara kumulatif jumlah RTLH sampai dengan akhir tahun 2016 yang belum tertangani sebanyak 71.413 unit atau setara dengan 6,88%. Kinerja ini telah melampaui 101,74% terhadap target tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 mencapai 98,11%.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang tidak layak huni yang difokuskan pada kawasan kumuh di kecamatan miskin, melalui APBD DIY hingga akhir tahun 2016 secara kumulatif telah ditangani sebanyak 66 lokasi kumuh yang setara dengan 61,68% dari jumlah total 107 lokasi kumuh serta dilaksanakan pemberdayaan komunitas perumahan. Secara kumulatif telah tertangani sebanyak 393 komunitas perumahan yang diberdayakan atau setara dengan 87,72% dari jumlah total komunitas perumahan sebanyak 438 komunitas.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan yang telah tercakup dalam keempat misi diatas, Pemda DIY melaksanakan beberapa urusan sebagai pendukung visi dan misi RPJMD 2012-2017, meliputi urusan perencanaan pembangunan, kepemudaan dan olahraga, koperasi dan UKM, kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sosial, statistik, kearsipan, perdagangan dan transmigrasi.

### **1) Perencanaan Pembangunan**

Dalam urusan pemerintahan perencanaan pembangunan terdapat empat sasaran dan indikator sasaran, meliputi : Pertama, keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat dengan indikator sasaran persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan. Realisasi kinerja sasaran keterpaduan program/kegiatan pembangunan RPJMD pada tahun 2016, sebesar 13,95% atau memiliki persentase realisasi sebesar 71,51% dari target. Capaian tersebut dihitung berdasarkan realisasi capaian dari 129 indikator sasaran yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD 2012-2017. Pada tahun 2016 dilakukan rasionalisasi RPJMD 2012-2017 dengan pertimbangan banyaknya target RPJMD yang sudah terlampaui target capaian kinerjanya dan tingkat urgensi tiap indikator sasaran. Realisasi tahunan sebesar 13,95%, dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2016 sebesar 10,86% belum dapat direalisasikan.



Kedua, sedangkan untuk indikator capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD memiliki realisasi sebesar 2016 sebesar 92,70% sedangkan target yang akan dicapai sebesar 89,14%. Realisasi seperti ditunjukkan pada tabel di atas dapat diartikan target kinerja sasaran ke-2 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran ke-2 pada tahun 2016

sebesar 92,70%. Dari 507 indikator program yang ada di perubahan RPJMD 2012-2017 sebanyak 470 indikator program tercapai.

Ketercapaian sasaran tahunan tersebut menunjukkan tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan. Pengendalian yang sudah dilakukan terhadap pelaksanaan capaian sasaran tahunan sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian sasaran melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda DIY dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (Indikator Kinerja Utama) Pemda DIY sebagaimana arah RPJMD DIY 2012-2017.

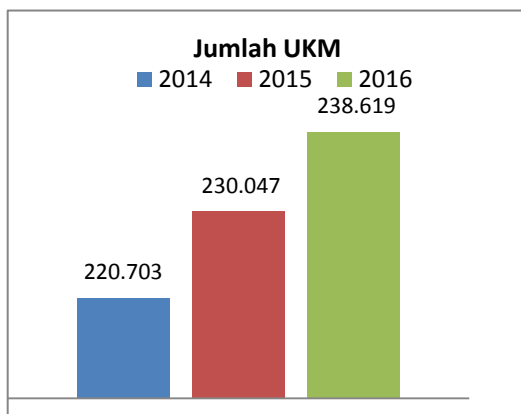
## 2) Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Pada tahun 2016 realisasi jumlah sentra pemuda adalah sebanyak 14 sentra, sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Capaian ini masih sebesar 93,33% dari target akhir RPJMD sebanyak 15 sentra. Sedangkan untuk prosentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/ pemberdayaan pemuda adalah sebesar 100%, sesuai dengan besaran yang ditargetkan. Capaian ini telah sesuai dengan target akhir RPJMD yang sebesar 100%.

Di tahun 2016, kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 365 kelompok atau dapat tercapai 100% dari target. Hal ini mencerminkan tingginya motivasi masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan yang didukung dengan ketersediaan fasilitas dari BPO selaku penyelenggara kegiatan. Capaian tahun 2016 ini masih sebesar 95,06% dari target akhir RPJMD.

### 3) Urusan Koperasi dan UKM.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian daerah terutama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di DIY. Pada tahun 2016, 2.738 unit, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.685 Unit (1,97%) yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut termasuk kategori aktif sebesar 2.427 dan pasif sebesar 311 Unit. Kinerja Usaha Koperasi meningkat dengan ditandai meningkatnya volume usaha sebesar Rp 874.253 juta, atau sebesar 24,29%, dari Rp 3.599.547 juta menjadi Rp 4.473.800 juta.



Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian DIY ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 4,23%, yaitu dari 220.703 unit usaha pada tahun 2015 menjadi 230.047 unit usaha. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 238.619 unit usaha atau meningkat sebesar 3,73%. Penurunan prosentase perkembangan jumlah UMKM mempengaruhi produktifitas UMKM untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Persentase pelaku UMKM mencapai lebih dari 90 persen dari sektor usaha yang ada di DIY. Jumlah pelaku UMKM di DIY pada tahun 2016 mencapai 230.047 orang yang bergerak di bidang kerajinan, kuliner, fesyen, termasuk yang bergerak di usaha kreatif. Sektor UMKM selama ini berkontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Pada triwulan III 2016, sektor perdagangan yang tidak lepas dari peran UMKM berkontribusi 0,48 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Oleh sebab itu, UMKM menjadi salah satu sektor prioritas yang terus digenjot untuk menopang pertumbuhan perekonomian DIY selain dua sektor lainnya yakni pertanian dan jasa.



#### **4) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.**

Pada tahun 2016, Pemda DIY menargetkan 96,5% penduduk DIY telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat dalam *database* KTP-el. Hal ini dilakukan melalui pelayanan perekaman "jemput bola", pembersihan data ganda, dan penyederhanaan prosedur pelayanan perekaman biometrik. Angka perekaman KTP-el di DIY hingga Desember 2016 mencapai 97,17%. Itu menunjukkan, realisasi angka perekaman di DIY terhadap target RPJMD 2016 adalah sebesar 100,70%. Dibandingkan dengan angka realisasi 2015, tahun ini terjadi kenaikan sebesar 4,95%.

Jumlah penduduk wajib KTP di DIY sampai dengan Desember 2016 berdasarkan database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di kabupaten/kota adalah 2.717.385 orang. Dari jumlah tersebut 97,17% atau sebanyak 2.640.612 orang telah perekaman biometrik dan tercatat di database KTP-el. Meski angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di DIY telah melampaui target RPJMD, masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 76.773 orang atau 2,83% dari total wajib KTP. Penduduk yang belum melakukan perekaman karena alasan tinggal sementara di luar DIY, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor ke Dinas Dukcapil.

Sampai akhir 2016 angka kepemilikan akta kelahiran anak yang tercatat di *database* SIAK kabupaten/kota di DIY sebesar 80,97%. Angka tersebut telah melampaui target nasional 2016 yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri sebesar 77,5%.

#### **5) Urusan Komunikasi dan Informatika.**

Pemerintah Daerah DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 telah menetapkan *Blueprint Jogja Cyber Province* yang menitikberatkan pada program *Digital Government Services* (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka pengembangan DGS, telah dilakukan *Updating Blueprint* DGS pada tahun 2011. Pencapaian Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa berupa pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan *Digital Government Services* (DGS).

Sampai dengan tahun 2016 ada lebih dari 2.700 komputer yang terhubung dengan Jaringan Pemda DIY. Sedangkan untuk *bandwidth* internet, Pemda DIY pada tahun 2016 mengalokasikan sebesar 420 Mbps. Dari 119 titik sambungan

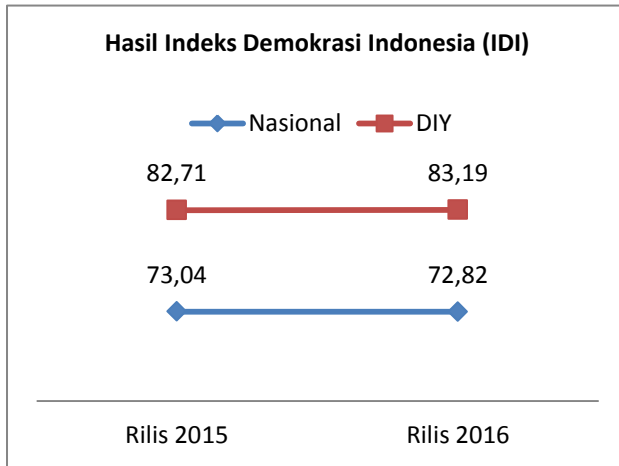
yang ada di Pemda DIY sebanyak 76 titik menggunakan koneksi *Fiber Optic*. Sedangkan pengakses informasi aktivitas Pemda DIY melalui web dilihat berdasarkan jumlah kunjungan rata-rata pada website Pemerintah Daerah DIY yaitu sebanyak 172.600 kunjungan/bulan.

## **6) Urusan Pertanahan.**

Sampai dengan saat ini telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak ±13.877 bidang dengan keluasan ±79.331.371 m<sup>2</sup> dan untuk Tanah Desa sebanyak ±31.804 bidang dengan keluasan ±209.664.472 m<sup>2</sup>, juga telah dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten sifatnya berkelanjutan mulai dilaksanakan pada tahun 2014 selanjutnya dilakukan pengembangan dan *updating* data. Jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 12.479 bidang. Capaian terhadap target 2016 sebesar 113% adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 terhadap target RPJMD 2017 adalah sebesar 95,73%. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 4.098 bidang dan telah terbit sebanyak 2.070 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat.

## **7) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.**

DIY yang multikultur selalu dihadapkan pada resiko dan potensi konflik sosial ketika berbagai perubahan yang terjadi tidak diantisipasi dan tidak dikelola dengan baik. Melalui koordinasi dengan forum-forum yang menjadi mitra Pemda DIY dan ditetapkannya Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga dan Pergub DIY Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial. Saat ini telah terbentuk seratus tiga belas (113) Jaga Warga di Kabupaten/Kota dari 25 yang ditargetkan sampai tahun 2016. Dengan adanya Jaga Warga permasalahan-permasalahan yang diperkirakan akan muncul disekeliling kita diharapkan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).



Berdasarkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis 2016, BPS mencatat DIY sebagai provinsi dengan nilai capaian 83,19 yang tergolong baik dengan peringkat kedua terbaik nasional. Indeks Demokrasi di DIY melampaui rerata nasional (83,19 dari rerata 72,82). Angka ini naik 0,48 poin dibandingkan dengan IDI DIY yang dirilis tahun 2015

sebesar 82,71 dan mengalami perubahan tingkat demokrasi. Lebih detail, capaian kebebasan sipil (90,41 dari rerata nasional 80,30), capaian hak-hak politik (77,98 dari rerata nasional 70,63) dan lembaga demokratis (82,38 dari rerata nasional 66,87).

## 8) Urusan Sosial.

Permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kedisabilitas dan kebencanaan di DIY menjadi prioritas utama untuk ditangani bersama. Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok,



**Gambar 7. Unit Pelayanan Sosial Keliling Bagi Penyandang Disabilitas**

dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemda DIY dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam target dan realisasi urusan sosial tahun 2016.

Persentase Anak Bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial, target 2016 sebesar 28,35% (7.810

orang) dengan realisasi sebesar 53,13% (13.077 orang) atau dengan persentase capaian sebesar 187,41%.

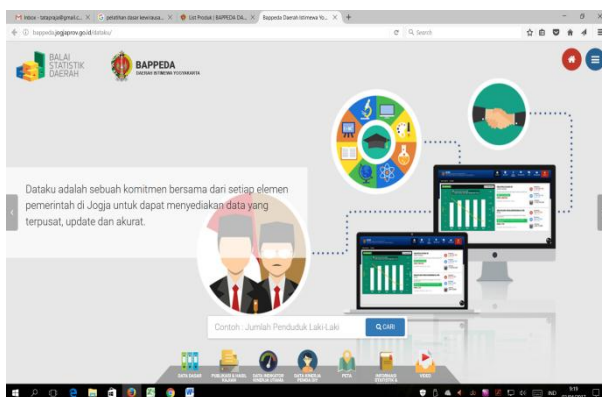
Persentase Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan dan Para Tuna Sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial, target 2016 sebesar 11,58% (9.495 orang) dengan realisasi sebesar 18,79% (9.454 orang). Capaian target 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 14,79% (127,04%).

Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial, target 2016 sebesar 73,47% (1.702 orang) dengan realisasi sebesar 73,47% (1.702 orang), capaian tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 73,86% (99,47%).

Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial, dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat, target 2016 sebesar 63,02% (18.581 orang) dengan realisasi sebesar 64,56% (20.769 orang) atau dengan persentase capaian sebesar 102,441%. Capaian tahun 2016 terhadap akhir RPJMD 2017 sebesar 70% adalah 92,23%. Capaian tersebut melebihi target karena semakin banyak masyarakat yang tertarik mengikuti kegiatan Peningkatan Jiwa Nasionalisme pada Generasi Muda dan Masyarakat melalui ziarah rombongan.

## 9) Urusan Statistik.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja urusan statistik dilaksanakan melalui Program Pengembangan Statistik Daerah yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Daerah. Hasil analisis dan data tersebut di atas dilaksanakan untuk menyediakan bahan masukan yang digunakan dalam perencanaan. Analisis PDRB, ICOR dan Makro Ekonomi sebagai input yang menyajikan kondisi perekonomian yang sudah, sedang dan akan berlangsung. Analisis tentang kinerja perekonomian tersebut menjadi salah satu dasar dalam perumusan permasalahan pembangunan. Sementara Analisis IPM dimaksudkan untuk menyediakan bahan analisis terkait dengan isu kesejahteraan sosial di masyarakat.



Gambar 7. Sistem Aplikasi Dataku

Untuk meningkatkan kapasitas

pengelolaan data perencanaan dibangun Sistem Aplikasi Dataku yang dikembangkan mulai tahun 2014 dengan tujuan mengintegrasikan data perencanaan pembangunan di DIY. Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan tahun 2016 adalah sebesar 98%, sedangkan capaiannya adalah terisi 5.123 dari 5.226 elemen data atau 98,03%, yang berarti pencapaiannya sebesar 100,03% dari target. Pada tahun sebelumnya atau tahun 2015, tingkat keterisian data ditargetkan 97%, dan realisasinya juga telah dapat melampaui target yaitu sebesar 97,07% atau terisi 3.508 dari 3.614 elemen data.

#### **10) Urusan Kearsipan.**

Jumlah penambahan khasanah arsip tahun 2016 berasal dari arsip yang sudah diolah di Arsip Puro Pakualaman dan Arsip Kraton sebanyak 3.162 berkas dan Arsip BPAD DIY 8.694 berkas. Sehingga realisasi capaian tahun 2016 persentase penambahan khasanah arsip dari jumlah arsip yang sudah ada adalah sebesar 49.62%. Sedangkan jumlah arsip yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun 2016 terdapat 5.205 berkas. Jumlah tersebut terdiri dari penggunaan arsip di BPAD DIY dan juga penggunaan arsip di Puro Pakualaman dan Kraton.

#### **11) Urusan Perdagangan.**

Kinerja Perdagangan Luar Negeri DIY menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan nilai ekspor DIY setiap tahun rata-rata sebesar 12,13%. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2016 tercatat US\$ 252,18 Juta. Jumlah tersebut meningkat sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, dan minyak atsiri. Sedangkan negara tujuan ekspor utama komoditas DIY adalah Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda.

**Tabel 6 Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2012 – 2016**

<b>Uraian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Volume (Juta kg)	33,54	34,03	57,51	56,90	57,01
Nilai (Juta US \$)	177,07	211,76	233,25	242,47	252,18
Komoditi	108	127	166	110	88
Negara	98	111	114	115	112
Eksportir	235	286	310	325	286

*Sumber: Sumber: Disperindag DIY Tahun 2017*

Tahun 2016, sektor perdagangan memberikan sumbangan sekitar 17,84% dalam struktur PDRB DIY atau sebesar Rp 15.642.125 Juta. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY mengalami peningkatan sebesar 5,78% atau sebesar Rp 855.090 Juta.

## **12) Urusan Ketrasmigrasian.**

Pemda DIY telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 565 KK selama kurun waktu 2012-2016, yaitu masing-masing 165 KK pada tahun 2012, 150 KK pada tahun 2013, 70 KK pada tahun 2014, 100 KK pada tahun 2015, dan 80 KK pada tahun 2016.


Di tahun 2016 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberangkatkan transmigran ke 3 (tiga) lokasi yaitu di 1) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komening Ilir, Simpang Tiga SP 5 sebanyak 20 KK, 2) Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kayong Utara, Simpang Tiga sebanyak 10 KK dan 3) Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Sepunggur sebanyak 50 KK.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY tahun 2016 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik dari jajaran pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.*

Yogyakarta, 13 April 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X